

Submission	Review Process	Revised	Accepted	Published
19-09-2021	25-09 s/d 25-12-2021	28-12-2021	27-01-2022	29-01-2022

*Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 3 No.1, Januari 2022 (34-43)*

Published by: Politik Islam UIN Raden Fatah Palembang

## **Etika Politik Islam Pada Pileg 2019 Perspektif Nahdhatul Ulama Lubuklinggau**

**Reksi Saputra**

Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: [Reksisaputra569@gmail.com](mailto:Reksisaputra569@gmail.com)

### **ABSTRACT**

This thesis discusses Islamic Political Ethics During General Elections in the Perspective of Nahdlatul Ulama (Study of Nahdlatul Ulama Lubuklinggau Ulama and Politicians). This study uses a qualitative type of research method, this study aims to determine the ethics of Islamic politics at the time of the general election in the perspective of scholars and politicians from Nahdlatul Ulama, Lubuklinggau City, South Sumatra Province. There were six informants in this study, consisting of three scholars and three politicians who joined the Nahdlatul Ulama group of Lubuklinggau City.

Data and information were obtained and collected from interviews with three ulama and three Nahdlatul Ulama politicians in Lubuklinggau City. This study discusses Islamic political ethics in the perspective of ulama and politicians from the Nahdlatul Ulama City of Lubuklinggau which is then associated with the theory of political ethics according to Nurcholish Madjid, namely democracy, justice, and pluralism and the theory of political ethics according to Ibnu Miskawaih, namely the theory of the middle way (*Nadzar Aus'at*). The results of this study indicate that political ethics at the time of the general election in the perspective of Ulama from Nahdlatul Ulama Lubuklinggau City are Islamic political ethics such as honest and fair ethics, polite political ethics, and trustworthy ethics. Then for political ethics during general elections in the perspective of politicians from the Nahdlatul Ulama Lubuklinggau City are Islamic political ethics such as unity, peace and deliberation.

Keywords: *Islamic Political Ethics, Ulama NU, Politician NU, General Elections*

### **ABSTRAK**

Tulisan ini mengkaji tentang Etika Politik Islam Pada Saat Pemilihan Umum Dalam Perspektif Nahdlatul Ulama (Studi Pada Ulama dan Politisi Nahdlatul Ulama Lubuklinggau). Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui etika politik Islam pada saat pemilihan umum dalam perspektif ulama dan politisi dari Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau

Provinsi Sumatera Selatan. Informan dalam penelitian ini berjumlah enam orang, yang terdiri dari tiga orang ulama dan tiga orang politisi yang tergabung kedalam golongan Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau.

Data dan informasi diperoleh dan dikumpulkan dari wawancara kepada tiga ulama dan tiga politisi Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau. Penelitian ini membahas etika politik Islam dalam perspektif ulama dan politisi Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau yang kemudian dikaitkan dengan teori etika politik menurut Nurcholish Madjid yaitu demokrasi, keadilan, dan pluralisme dan teori etika politik menurut Ibnu Miskawaih yaitu teori jalan tengah (*Nadzar Aus'at*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika politik pada saat pemilihan umum dalam perspektif Ulama dari Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau adalah etika politik Islam seperti etika jujur dan adil, etika politik santun, dan etika yang amanah. Kemudian untuk etika politik pada saat pemilihan umum dalam perspektif Politisi dari Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau adalah etika politik Islam seperti persatuan, perdamaian dan musyawarah.

*Keywords: Etika Politik Islam, Ulama NU, Politisi NU, Pemilihan Umum*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang berbeda-beda. Indonesia juga merupakan negara demokrasi terbesar ketiga setelah negara Amerika Serikat dan Negara India. Namun besarnya demokrasi di Indonesia selama bertahun-tahun tidak menjamin proses demokrasi yang semakin baik. Menurut Joseph A. Schemer demokrasi merupakan perencanaan guna mencapai keputusan politik dimana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif untuk suara rakyat (Sulisworo, 2012:2). Dengan demikian demokrasi di Indonesia merupakan cara individu untuk mendapatkan kebebasan menyuarakan dan mendapatkan suara melalui pemilihan umum.

Pengkajian lebih dalam mengenai persoalan kehidupan politik yang ada di Indonesia saat ini begitu kompleks, hal ini dikarenakan Indonesia sudah mengalami persoalan masa yang begitu kelam di dalam dunia politik, diawali pada masa kemerdekaan yaitu masa orde lama hingga berlanjut ke masa orde baru sampai ke orde reformasi tahun 1998. Sistem politik di Indonesia kian berubah hingga masa transisi yang dahalunya sistem perpolitikan lebih mengarah ke otoritarian, namun sekarang sudah lebih beranjak ke arah yang dikenal dengan Demokrasi (Sarifuddin, 2020:13).

Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum. Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun pemilihan umum merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Surbakti, 2008-12). Begitu juga di Indonesia, pemilihan umum dilaksanakan sebagai wujud dari demokrasi yang merupakan sarana dalam mengapresiasi yang ada didalam masyarakat yang sebelumnya diartikulasikan oleh partai politik sesuai dengan fungsinya.

Saat ini dimulai dari periode reformasi bahwasanya pemilu yang ada di Indonesia maupun Kota Lubuklinggau dianggap bebas dan adil. Namun, kenyataannya sampai saat ini politik Indonesia dan kota Lubuklinggau belum bebas

dari namanya politik uang (*Money Politic*). Perilaku money politic dalam konteks politik sekarang, seringkali di atas namakan sebagai bantuan, infaq, shadaqah dan lain sebagainya. Pergeseran istilah money politic ke dalam istilah moral ini secara tidak langsung telah menghasilkan perlindungan secara sosial melalui norma kultural masyarakat yang memang melazimkan tindakan itu terjadi. Tatkala masyarakat telah menganggapnya sebagai tindakan lumrah, maka kekuatan legal formal hukum akan kesulitan untuk menjangkaunya. Bagi rakyat, money politic ibarat bonus rutin di masa Pemilu yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan dimana orang bisa membeli kekuasaan ataupun posisi politik seperti suara rakyat dalam pemilihan umum Kepala Daerah maupun pemilihan umum lainnya (Indra, 1999:68).

Etika politik merupakan kumpulan nilai yang berkenaan dengan akhlak untuk mengatur dan memimpin sesuatu dengan cara yang mendatangkan kemaslahatan (Purwosaputro, 2009:109). Kota Lubuklinggau juga terdapat organisasi Islam terbesar yaitu Nahdlatul Ulama (NU), terdapat anggota-anggota dari Nahdlatul Ulama yang paham dengan ajaran Islam juga bergabung ke dalam dunia politik dan menjadi politisi. Demikian dalam hal ini tentunya para anggota Nahdlatul Ulama maupun politisi yang ada di Kota Lubuklinggau idealnya memahami apa itu arti dari etika politik Islam.

Nahdlatul Ulama sebagai salah satu organisasi Islam terbesar dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia, dan merupakan organisasi yang berbasis massa di bawah kepemimpinan ulama (Halim, 1970:12,15). Keyakinan yang mendalam terhadap berbagai pemikiran, gagasan, konsep disegala hal, serta metode-metode yang diusung Nahdlatul Ulama diyakini sebagai kunci untuk eksistensi dan terus bertahan hingga saat ini (Yusuf, 2010:3). Nahdlatul Ulama tentunya merupakan organisasi yang paham mengenai ajaran Islam dan juga berkecimpung dalam dunia politik di Indonesia.

Berkenaan dengan pelaksanaan pemilu di Indonesia yang sebelumnya masih dipenuhi oleh pelanggaran pelaksanaan pemilu yang masih belum sesuai dengan norma hukum dan etika politik yang berlaku di Indonesia. Mengingat posisi Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam di Indonesia, diharapkan hadir memberikan atensi dan sumbang saran terutama berkenaan dengan etika politik didalam Islam. Dari alasan tersebut sehingga peneliti tertarik untuk mencari tahu perspektif ulama dan politisi tentang etika politik Islam dalam pemilihan umum dari Nahdlatul Ulama khususnya di Kota Lubuklinggau.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Syarifuddin, dengan judul "Etika Politik Islam Dalam Pemilu". Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui Etika Politik Islam Dalam Pemilu serta untuk mengetahui sistem pemilihan pemimpin dalam Islam. Persamaan penelitian Syarifuddin dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang Etika Politik Islam. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini, jika penelitian Syarifuddin meneliti Etika Politik Islam Dalam Pemilu, penelitian yang dilakukan peneliti ini akan meneliti tentang Etika Politik Islam pada saat Pemilihan Umum dalam Perspektif Nahdlatul Ulama yang dikhususkan pada Ulama dan Politisi Kota Lubuklinggau (Syarifuddin, 2012).

Sugiyono, dengan judul "Konsep Etika Politik Dalam Perspektif Alisyari'ti". Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui etika politik dan konsep

politik Alisyari'ti. Persamaan penelitian Sugiyono dengan penelitian ini sama-sama meneliti tentang Etika Politik. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini, jika penelitian Sugiyono meneliti tentang Konsep dari Etika Politik dalam Perspektif Alisyari'ti, penelitian yang dilakukan peneliti ini akan meneliti tentang Etika Politik Islam pada saat Pemilihan Umum dalam Perspektif Nahdlatul Ulama yang dikhususkan pada Ulama dan Politisi Kota Lubuklinggau (Sugiyono, 2019).

A Fikri Thia Naufal, dengan judul "Etika Politik Menurut Mahfud MD Dalam Perspektif Fiqih Siyasah". Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui etika politik menurut Mahfud MD dalam analisis fiqih siyasah terhadap etika politik. Penelitian A Fikri Thia Naufal menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini, jika penelitian A Fikri Thia Naufal meneliti tentang Etika Politik Menurut Mahfud MD dalam Perspektif Fiqih Siyasah, penelitian yang dilakukan peneliti ini akan meneliti tentang Etika Politik Islam pada saat Pemilihan Umum dalam Perspektif Nahdlatul Ulama yang dikhususkan pada Ulama dan Politisi Kota Lubuklinggau (Naufal, 2020).

Abdul Salam Ahmad, dengan judul "Paradigma Etika Politik Nabi Muhammad Sebagai Acuan Terhadap Politik Kontemporer Di Indonesia". Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui etika politik nabi Muhammad. Persamaan penelitian ini dengan rencana penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama meneliti tentang etika politik. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini jika penelitian Abdul Salam Ahmad meneliti tentang Paradigma Etika Politik Nabi Muhammad Sebagai Acuan Terhadap Politik Kontemporer Di Indonesia sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini akan meneliti tentang Etika Politik Islam pada saat Pemilihan Umum dalam Perspektif Nahdlatul Ulama yang dikhususkan pada Ulama dan Politisi Kota Lubuklinggau (Ahmad, 2015).

Rahmita, dengan judul, "Perspektif Masyarakat Terhadap Etika Politik Kampanye Partai Aceh (Studi Kasus Kampanye Partai Aceh Pasca Pemilu 2019 di Gayo Lues)". Dalam penelitian ini untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap kampanye partai Aceh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan sama-sama meneliti tentang etika politik. Sedangkan perbedaannya jika penelitian yang dilakukan Rahmita meneliti tentang etika politik dalam kampanye, penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang etika politik islam pada saat Pemilihan Umum perspektif Nahdlatul Ulama yang dikhususkan pada Ulama dan Politisi (Rahmita, 2019).

Dengan demikian perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain ialah terletak pada objek dan subjek penelitian yang berbeda, metode penelitian dan beberapa teori yang berbeda juga. Objek pada penelitian ini dilakukan pada Nahdlatul Ulama di Kota Lubuklinggau serta subjek pada penelitian ini ialah Ulama dan Politisi yang termasuk dari golongan Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena, tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, yang secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konten khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2011:16). Jenis penelitian ini yaitu menggunakan jenis

penelitian dekriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data- data (Narbuko, 2013:14).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil dan informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara yang selanjutnya data atau informasi yang diperoleh kemudian dianalisis. Proses pengambilan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober – November 2021 dengan enam informan yaitu ulama dan politisi Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau. Proses wawancara dengan informan pada penelitian ini dilakukan dengan bertemu secara langsung dengan informan maupun wawancara via online. Berikut hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian yang berjudul Etika Politik Islam Pada Saat Pemilihan Umum Dalam Perspektif Nahdhatul Ulama: Studi Pada Ulama Dan Politisi Nahdhatul Ulama Lubuklinggau.

### **1. Etika Politik Islam Pada Saat Pemilihan Umum Dalam Perspektif Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Kota Lubuklinggau.**

Etika politik Islam pada saat pemilihan umum dalam perspektif ulama NU (Nahdlatul Ulama) Kota Lubuklinggau, etika politik islam yang diamalkan dan diajarkan oleh NU (Nahdlatul Ulama) Kota Lubuklinggau sesuai dengan ajaran Islam ialah etika politik Islam yang santun atau politik santun, etika jujur dan adil,serta etika yang amanah dan juga bertanggung jawab. Dimana etika-etika politik tersebut harusnya diterapkan oleh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali pada saat pemilihan umum, dalam upaya terciptanya etika politik yang baik dan benar sesuai ajaran Islam.

Adapun penjelasan mengenai beberapa etika politik Islam menurut pendapat para ulama Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau, yaitu sebagai berikut

#### **a) Jujur dan Adil**

Jujur dan adil merupakan etika politik yang harus diterapkan dalam demokrasi pada pemilihan umum. Jujur merupakan salah satu sifat baik yang paing dihargai. Jujur artinya perbuatan baik itu tidakan maupun sikap yang baik demi kenyamanan hidup. kejujuran juga merupakan sikap paling sulit terjadi didalam hubungan, misalnya saja pada pemilihan umum dimana terdapat hubungan-hubungan antar petisi dan politisi yang seringkali sulit terciptanya kejujuran dalam hubungan tersebut. Adil atau keadilan merupakan sikap penting untuk masyarakat. Tanpa etika, politik akan terjerumus kedalam prilaku yang menyimpang dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.

#### **b) Politik Santun**

Berbicara mengenai etika dalam kehidupan berbangsa dan benegera, Indonesia saat ini berada pada masa kebebasan dalam berpolitik setelah melewati masa kelam dalam dunia politik. Dengan adanya kebebasan berpolitik, maka etikapolitik santun perlu berada ditengah kebebasan berpolitik tersebut. mengatakan etika politik santun merupakan etika politik Islam yang diamalkan oleh Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau.

Pada pemilihan umum etika politik santun juga harus diterapkan karena dengan terjalannya politik santun maka pemilihan umum dan juga demokrasi akan berjalan dengan baik dan lancar. Politik santun adalah salah satu budaya yang bermartabat da nada pada

nilai-nilai Islam.

c) Amanah

Amanah merupakan sikap nabi Muhammad SAW, yang artinya amanah adalah etika yang ada dalam ajaran Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) amanah artinya dapat dipercaya. Sebagai muslim tentunya memahami etika amanah begitu juga dalam berpolitik. Pada pemilihan umum etika amanah kadang terjadi dan ada juga yang seringkali melupakan amanahnya ketika sudah menang dari pemilihan umum. Dengan demikian, etika amanah seringkali terlaksana dan juga terlupakan.

Kemudian, dari data ataupun informasi yang diperoleh tersebut, selanjutnya akan dikaitkan dengan teori etika politik Islam yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori etika politik Islam menurut Nurcholish Madjid. Etika politik berdasarkan teori Nurcholish Madjid diklasifikasikan kedalam tiga prinsip yaitu demokrasi, keadilan, dan pluralisme.

Adapun dari pendapat ulama mengenai etika politik Islam pada saat pemilihan umum dalam perspektif Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau tersebut, yang akan dikaitkan dengan teori etika politik menurut Nurcholish Madjid, yaitu sebagai berikut:

a) Demokrasi

Demokrasi pada tingkat lokal dianggap sebagai sesuatu yang penting terutama bagi masyarakat tingkat lokal itu sendiri. Dinamika demokrasi melalui Pemilu pasti terjadi setiap dilaksanakannya Pemilihan Umum. Menurut Nurcholish Madjid, demokrasi merupakan sesuatu yang bukan statis, dalam hal ini demokrasi berada pada kategori dinamis yang artinya selalu bergerak terus, baik secara positif maupun negatif. Demokrasi yang baik merupakan demokrasi yang disertai dengan sosialisme yang akan mendorong masyarakat untuk mewujudkan etika berkeadilan sosial (Madjid, 1994:215)

b) Keadilan

Dalam Islam, prinsip keadilan sudah ditegakkan dari sejak kehadiran para rasul. Dalam masyarakat demokrasi memiliki tujuan hendak mewujudkan keadilan sosial sebagai hal menjamin kepentingan bersama. Implementasi etika keadilan sosial, menjadi jalan untuk menumbuhkan keadilan yang nyata bagi masyarakat. Dengan demokrasi, prinsip keadilan sosial mendapatkan ruang untuk bergerak dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat sebagai warga Negara (Hendra Nurtjahjo, 2008:98). Prinsip keadilan ini, menurut Nurcholish Madjid tampak jelas dalam berbagai pernyataan yang ada di Al-qur'an seperti, Tuhan Maha Adil (Madjid, 2005:112-115).

c) Pluralisme

Pluralisme merupakan prinsip yang menghargai adanya perbedaan dalam masyarakat, namun di Indonesia tidak banyak masyarakat yang begitu memahami arti dari pluralisme. Masyarakat seringkali memaknai sepintas saja arti dari pluralisme maka dari itu tak jarang masih banyak masyarakat yang kurang menghargai perbedaan

dan keberagaman budaya. Pluralisme, dalam pengertian harfiah, adalah kemajemukan. Pluralisme secara substansial, maknanya melampaui semua itu: kesediaan untuk melihat bahwa perbedaan adalah sebuah ketakrelakkan dan karena itu harus diterima sebagai sesuatu yang bersifat natural. Prinsip yang satu ini tidak sama sekali tercetus oleh pendapat para Ulama Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau.

1. Etika Politik Islam Pada Saat Pemilihan Umum Dalam Perspektif Politisi NU (Nahdlatul Ulama) Kota Lubuklinggau.

Etika politik Islam pada saat pemilihan umum dalam perspektif politisi NU (Nahdlatul Ulama) Kota Lubuklinggau, etika politik Islam yang seharusnya berada dan diterapkan pada saat pemilihan umum ialah etika politik Islam yang amanah, jujur, membentuk persatuan, perdamaian dan juga musyawarah baik sebelum maupun pada saat pemilihan umum atau bahkan setelah dilaksanakannya pemilihan umum etika-etika tersebut memang seharusnya berada di tengah masyarakat umum dan dunia perpolitikan.

Adapun penjelasan mengenai pendapat Politisi Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau mengenai beberapa etika politik Islam pada pemilihan umum sebagai berikut:

a) Persatuan

Dalam Pancasila, persatuan merupakan isi dasar dari Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Haeruddin mengatakan persatuan merupakan etika politik yang berlandaskan Pancasila dan juga terkandung nilai ajaran Islam. Etika persatuan yang ada pada pemilihan umum merutnya dapat dilihat dari masa kampanye dimana hal tersebut setiap tim pentisi bersatu untuk mengatur strategi kemenangan. Namun menurut Haerudin etika persatuan yang terjadi pada pemilihan umum ini hanya terjadi di setiap tim saja bukan antar tim yang akan mengikuti pemilihan umum.

Dengan demikian, etika politik Islam pada saat pemilihan umum menurut politisi Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau salah satunya persatuan yang juga terkandung didalam Pancasila.

a) Perdamaian

Etika politik Islam pada saat pemilihan umum salah satunya adalah etika politik dalam prinsip perdamaian. Dalam arti lain perdamaian merupakan salah satu ajaran pokok dalam ajaran Islam. Dalam ungkapan teks agama, perdamaian sering dibahasakan dengan "*al aman*". Dalam terminologi, *al aman* adalah sebuah kesepakatan untuk menghentikan peperangan dan pembunuhan dengan pihak musuh. Selain *al aman* masih ada beberapa istilah lain yang juga merujuk pada perdamaian, yakni *al sulh*, *al hudnah*, *al mu'ahadah* dan *aqd al zim-Mah*. Hal itu sebagaimana tertuang dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Secara jelas dalam QS. Al Furqan ayat 19 dinyatakan bahwa Islam datang sebagai agama yang membawa misi perdamaian dan dengan tegas mengharamkan kepada umat manusia melakukan kezaliman, kapan dan dimana saja (Asy'ari, 2019:45).

Dengan demikian, etika politik Islam yang baik dan terkandung di dalam Al-

Qur'an adalah etika politik Islam perdamaian, dimana etika ini juga harus berada ditengah pemilihan umum guna berjalannya pemilihan umum yang damai tanpa adanya kekisruhan yang dapat membuat perpecahan antara masyarakat yang sedang berdemokrasi dalam ajang pemilihan umum.

a) Musyawarah

Substansi demokrasi memberikan bentuk dan beberapa sistem yang praktis, misalnya pemilihan umum yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat, kebebasan berpendapat dan lain-lain (Lajnah, 2009:42). Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Dalam urusan kemasyarakatan, prinsip musyawarah ditegakkan sesuai dengan azas hukum yang mendasari sistem demokrasi. Tetapi musyawarah itu sendiri tidak terikat oleh komunitas yang sifatnya masih (pemerintahan atau kenegaraan) saja, ia menyentuh segala aspek yang menyangkut kepentingan bersama, bukan masalah yang telah menjadi ketetapan Tuhan (Mukhid, 2016:17).

Musyawarah merupakan prinsip yang ditegakkan sesuai dengan azas Islam, sama halnya dengan pendapat politisi Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau yaitu Dedi Kurniawan, dimana beliau mengemukakan pendapatnya bahwa salah satu etika politik Islam menurut pandangannya adalah etika atau prinsip Musyawarah. Etika ini merupakan sikap yang biasa digunakan dalam berdemokrasi, musyawarah dilakukan untuk mufakat.

Dalam pemilihan umum, musyawarah pasti dilakukan baik sebelum pelaksanaan pemilihan umum maupun setelah pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini dilakukan untuk mencapai sesuatu yang baik dengan sikap yang baik dan juga damai sehingga keluar dari berbagai masalah. Maka dari itu, etika musyawarah dalam Islam perlu sekali berada ditengah masyarakat khususnya masyarakat yang sedang berdemokrasi dalam pemilihan umum.

Dapat disimpulkan bahwa musyawarah merupakan sikap atau prinsip yang ada dalam ajaran Islam dan juga digunakan dalam kehidupan bersosial masyarakat. Musyawarah juga seringkali digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah atau berbagai persoalan yang terjadi didalam masyarakat baik masyarakat secara umum maupun didalam dunia politik dan pada saat pemilihan umum.

Dari pendapat politisi Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau mengenai etika politik Islam pada saat pemilihan umum tersebut, selanjutnya dikaitkan dengan teori etika politik Ibnu Miskawaih yaitu teori jalan tengah (*Nadzar Aus'at*). Menurut Ibnu Miskawaih, setiap keutamaan mempunyai dua ekstrem. Yang tengah adalah yang terpuji dan yang ekstrem adalah tercelah. Posisi tengah di sini adalah suatu standar atau prinsip umum yang berlaku bagi manusia (Miskawaih, 1996). Adapun teori etika jalan tengah (*Nadzar Aus'at*) menurut Ibnu Miskawaih yaitu sebagai berikut:

1. Posisi Tengah Ekstrem antara kelebihan dan kekurangan.
2. Posisi Tengah Daya Bernafsu antara menggumbar dan mengabaikan nafsu dalam berpolitik.
3. Posisi Tengah Daya Berani antara nekad dan pengecut.
4. Posisi Tengah Daya Berpikir antara kebodohan dan kedunguan

Dengan demikian dapat disimpulkan, berdasarkan teori etika politik jalan tengah menurut Ibnu Miskawaih tersebut, yang dikaitkan dengan perspektif politisi Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau bahwasanya tidak sama sekali ada kaitannya.

Pendapat para politisi Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau sama sekali tidak mengarah kepada teori jalan tengah Ibnu Miskawaih. Adapun perspektif politisi Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau mengenai etika politik Islam pada saat pemilihan umum adalah etika politik Islam dalam wujud persatuan, perdamaian, dan musyawarah. Dengan demikian, etika politik Islam pada saat pemilihan umum dalam perspektif politisi Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau tidak ada kaitannya dengan teori jalan tengah Ibnu Miskawaih.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini dan hasil wawancara yang telah diolah serta dianalisis, maka peneliti dapat simpulkan bahwasanya sebagai berikut:

1. Etika politik Islam pada saat pemilihan umum dalam perspektif Ulama Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau adalah etika politik Islam seperti etika jujur dan adil, etika politik santun, dan etika yang amanah. Dalam perspektif Ulama NU Kota Lubuklinggau, etika politik Islam pada saat pemilihan umum ada kaitannya dengan teori etika politik menurut Nurcholish Madjid. Teori etika politik yang ada menurut Nurcholish Madjid yaitu demokrasi, keadilan, dan pluralisme juga hampir sama dengan pendapat Ulama NU Kota Lubuklinggau, hanya saja satu etika dalam konteks pluralisme yang tidak keluar dari pendapat ketiga Ulama Nahdlatul Ulama (NU) Kota Lubuklinggau.
2. Dalam perspektif politisi Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau, etika politik Islam yaitu persatuan, perdamaian dan musyawarah. Etika politik Islam pada saat pemilihan umum perspektif politisi Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau tidak ada kaitannya sama sekali dengan teori etika politik jalan tengah menurut Ibnu Miskawaih, karena ketiga politisi Nahdlatul Ulama Kota Lubuklinggau tidak sama kali menyebutkan pendapatnya yang mengarahke teori jalan tengah menurut Ibnu Miskawaih.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Salam Abdul. 2015. *Paradigma Etika Politik Nabi Muhammad Sebagai Acuan Terhadap Politik Kontemporer di Indonesia*, Skripsi Yogyakarta, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 1970. *Sejarah Perjuangan KH. Abdul Wahab*. Bandung: Sinar Baru
- Ismawan, Indra. Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu, (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), Cet-Ke-1.
- Madjid, Nurcholis. 2005. *Islam Doktrin dan Perdaban: sebuah Telaah Kritis tentang masalah Keimanan, kemanusiaan, dan kemodernan*. Jakarta: Paramadina.
- Miskawaih, Ibnu. 1996. *Tanzib al Akhlaq*, Beirut: American University Press.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Purwosaputro, Supriyono. 2009. *Sudut Pandang Etika-Moral Filsafat Ornanisme (Filsafat Proses)*. Jurnal majalah ilmiah lontar, Vol. 23, No. 3.
- Ridwan, Gitosaroso. Muh. 2018. *Shalatnya Para Ahli Thariq: Shalat Dalam Perspektif Para Penganut Tarekat*. Tangerang Selatan: Pustakapedia
- Sarifuddin. 2020. *Konsep Etika Politik Al Mawardi Dan Penerapan Pada Masa Pemerintahan Jokowi, Skripsi*. Medan: Program Studi Pemikiran Politik Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Slamet, Effendi Yusuf. 2010. *Mengukuhkan Tradisi Memodemisasi Organisasi*
- Sugiarto, Eko. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. 2019. *Konsep Etika Politik Dalam Perspektif Alisyari'ti*". Jakarta : Vol2 No. 1. .
- Sulisworo, Dwi, dkk. 2012. *Demokrasi*. Program Studi Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan.
- Surabaya: Duta Aksara Mulia.
- Syarifuddin. 2012. *Etika Politik Islam Dalam Pemilu, Skripsi Yogyakarta* : Program Studi Jinayah Siyasa, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga.